

**PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA
PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN GIANJAR
TAHUN 2017-2018**

Ni Komang Kharisma Mia Mahartiningsih¹

Ni Wayan Yuniasih²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

In improving public services, budget allocations must be more for the public interest like capital expenditure. Sources of regional funding in creating regional infrastructure one of them is left over budget financing and employee spending. The aim of this research is to find out the influence remaining budget financing and employee expenditure towards capital expenditure. This research as conducted in the OPD in the Gianyar Regency with secondary data. Where the sample used is the same as the population. The study population and sample was 50.the theory used is agency theory. And the data used is secondarydata. From the research result obtained that the rest of the budget financing has not effect on capital expenditure and employee expenditure has a positive effect on capital expenditure.

Keywords: *Budgeting, left over budget financing, employee expenditure, capital expenditure, public service.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan hak yang luas untuk menggunakan sumber-

sumber perekonomian daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pengalokasian anggaran harus lebih diperuntukan bagi kepentingan publik seperti belanja modal. Alokasi belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah serta fasilitas publik (Abdullah dan Halim, 2006). Selama ini alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif dan sisanya yang hanya sebagian kecil digunakan untuk belanja modal (Abdullah dan Rona, 2014).

Pemerintah ditantang untuk mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah daerah harus memberikan fasilitas pendukung sebagai investasi. Dengan demikian pemerintah hendaklah menambah komposisi alokasi belanja modal dengan lebih tinggi, karena dengan komposisi belanja modal yang semakin tinggi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif pemerintah dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Belanja modal bertujuan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik

yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan investor swasta nasional maupun investor asing enggan untuk berinvestasi di daerah sehingga menyebabkan perekonomian daerah tidak berkembang dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian (Deskripsi dan Analisis APBD, 2014).

Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah salah satunya adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau yang biasa disebut SILPA. Dalam struktur APBD berbasis kinerja yang baru, dimungkinkan terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran. Sisa anggaran tahun yang lalu merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Pada umumnya SILPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Besar kecilnya SILPA terkait dengan efisiensi anggaran dan pelampauan target pendapatan yang dilakukan daerah. SILPA yang dimiliki daerah dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah untuk dialokasikan pada belanja modal, investasi daerah, pembayaran utang, dan pembentukan dana cadangan. SILPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dimana lokasi

penelitiannya di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penggunaan SILPA salah satunya adalah untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dalam hal ini mencangkup belanja modal. SILPA yang semakin besar akan semakin besar pula realisasi belanja modal pada kabupaten dan kota (Mulyadi, 2014 dalam Nuzana,

2016). Semakin besar realisasi belanja modal akan berpengaruh terhadap varian belanja modal, apakah varian belanja modal itu masuk ke dalam *favourable variance* atau *unfavourable variance* (Mahmudi, 2006:157).

Besarnya alokasi belanja pegawai disebabkan oleh banyak hal, antara lain kenaikan jumlah pegawai dan program reformasi birokrasi. Faktor selanjutnya yang menyebabkan peningkatan belanja pegawai adalah kenaikan belanja pensiun serta pengangkatan pegawai honorer. Penelitian terkait hubungan belanja pegawai dengan alokasi belanja modal yang pernah dilakukan oleh LPEM FEUI yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan di tahun 2010 memperoleh hasil bahwa korelasi negative antara belanja pegawai dengan belanja modal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Jiwatami, 2013), yaitu tentang Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012 mendapatkan hasil bahwa belanja modal sangat dipengaruhi dengan arah yang berlawanan oleh belanja pegawai. Di setiap kabupaten/kota setiap tahun anggaran terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Akan tetapi, apabila

perencanaan yang dilakukan berjalan dengan baik maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA) tidak akan terjadi. Dalam kenyataannya Belanja Modal lebih banyak dipergunakan untuk belanja operasi dalam hal ini adalah belanja pegawai, alih-alih digunakan dalam hal pembangunan daerah. Dan tidak sepenuhnya SILPA dipergunakan untuk Belanja Modal. Hal tersebut membuat saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang ingin diteliti pada penelitian kali ini adalah :

1. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Gianyar ?
2. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Gianyar?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk menguji pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal di Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama

penelitian dan sebagai perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada topic yang sama di masa mendatang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja pegawai sebagai sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam membiayai belanja modal.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan tambahan referensi bacaan ini ilmiah serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitain terhadap belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

Teori agensi merupakan teori yang mempelajari hubungan atau keterkaitan pihak-pihak yang memiliki jalinan hubungan fungsional dan struktural, yaitu antara atasan (*principal*) dan bawahan (*agent*). Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori berfokus pada orang atau individu yang ada didalam organisasi dan bagaimana mereka berperilaku dan mencoba untuk menjelaskan perbedaan antara kepentingan *agent* dan *principal* yang mungkin dapat menimbulkan sebuah

konflik. Konflik ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal* karena terdapat perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah sebagai *agent* dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan public yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) didefinisikan sebagai selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening cadangan. SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah.

SILPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal menurut Kusnandar (2011), dan juga SILPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal diungkapkan oleh Maryadi (2014). Berdasarkan pemaparan teori diatas

dapat disimpulkan SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pengalokasian belanja pegawai yang besar dalam APBD tentunya juga akan berpengaruh pada pengalokasian belanja modal. Penelitian yang dilakukan Ayu, Nurlaela (2016), dikatakan bahwa kenaikan realisasi belanja pegawai akan memicu penurunan realisasi belanja modal. Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan daerah yakni peralatan, infrastruktur, dan harta benda tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan salah satu syarat dalam memberikan pelayanan publik.

Jiwatami (2013) dalam Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 2008-2012 mengatakan belanja modal sangat dipengaruhi dengan arah yang berlawanan oleh belanja pegawai.

Pengaruh positif juga dihasilkan dari penelitian yang dilakukan Laila Murhani Kasdy (2018) dalam judulnya Pengaruh PAD, dikatakan varian PAD, Dana Perimbangan, SILPA dan Belanja Modal baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap realisasi Belanja Modal.

Sedangkan dari penelitian Ayu Pratiwi (2017) dalam judulnya Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta menghasilkan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Afkarina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal memperoleh hasil PAD, DAU, dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan SILPA tidak berpengaruh terhadap belanjamodal.

Dari penelitian Zelmiyanti (2016) dalam judul Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, SILPA dan Pertumbuhan PAD terhadap Belanja Modal menghasilkan kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan SILPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pokok permasalahan penelitian yang akan diuji kebenarannya. Untuk itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA adalah indikator efisiensi, karena SILPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2008) memperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, pegawai Negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan atau

non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Dari penelitian Jiwatami (2013) dalam Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 2008-2012 mengatakan belanja modal sangat dipengaruhi oleh belanja pegawai. Dari landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Sisa lebih Pembiayaan anggaran (SILPA) Dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Gianyar yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (Independen) dimana variabel bebas tersebut adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Pegawai. Sedangkan variabel terikat (Dependen) adalah Belanja Modal.

Halim (2008:108) berpendapat selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi jika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sebaliknya, pendapatan daerah yang diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya, maka akan terjadi defisit APBD. Defisit APBD dapat ditutup dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan salah satunya adalah dengan SILPA daerah tahun sebelumnya.

SILPA digunakan juga sebagai salah satu sumber pendanaan untuk belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dalam membiayai pembangunan infrastruktur, memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Pengalokasian belanja pegawai yang besar dalam APBD tentunya juga akan berpengaruh pada pengalokasian belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah asset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.

Ketika menganggarkan belanja, kepala daerah cenderung mengusulkan jumlah atas kebutuhan yang sesungguhnya. Kepala daerah akan lebih menyukai besaran alokasi yang melebihi *real cost* (biaya sebenarnya) saat anggaran itu disusun (Abdullah dan Nazry, 2015). Besar kecilnya realisasi belanja modal dengan anggarannya akan menghasilkan selisih (varian). Variasi pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya (Mahmudi, 2006:88).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi dan penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau angka (Sugiyono, *statistic untuk pendidikan*)(Bandung:Alfabeta). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana yang diperoleh dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data-data yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gianyar. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini

adalah(sampling jenuh) sama dengan populasi yaitu sebanyak 50 populasi dan sampel.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mengolah dan mencatat data yang berkaitan dengan data penelitian.

Metode dalam pengumpulan data ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2017-2018. Instrumen penelitian digunakan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic deskriptif dan uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup ujinormalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji koefisien determinasi, uji f, uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik deskriptif sebagai analisis untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber : Lampiran 3

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X1) menunjukkan nilai minimumnya adalah-393.387.693.892.62 dan nilai maksimumnya 1.038.103.441.310.38 sedangkan mean yang diperoleh 1.552.833.431.493.26. Standar deviasinya sebesar

158.209.260.870.471.62. Hal ini berarti terjadi penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata sebesar 158.209.260.870.471.62.

2. Belanja Pegawai (X₂) menunjukkan nilai minimumnya adalah

1.891.199.013.00 dan nilai maksimumnya 345.906.772.734.00 sedangkan mean yang diperoleh 1.505.892.591.952.00. Standar deviasinya sebesar

52.997.364.076.316.28. Hal ini berarti terjadi penyimpangan variabel

terhadap nilai rata-rata sebesar 52.997.364.076.316.28.

3. Belanja Modal (Y) menunjukkan nilai minimumnya adalah

25.849.500.00 dan nilai maksimumnya 298.595.112.728.00 sedangkan mean yang diperoleh 811.441.990.856.88. Standar deviasinya sebesar

42.282.261.616.209.34. Hal ini berarti terjadi penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata sebesar 42.282.261.616.209.34.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan analisis regresi linier tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, variasi residual absolut sama atau tidak dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linier.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang biasa disebut dengan K-S yang tersedia dalam program *SPSS 21.00 For Windows*. Kriteria yang digunakan adalah dengan

membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila $\text{sig} > 0,05$ (Ghozali, 2006).

Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardizedresidual* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan outlier data terlebih dahulu. Outlier data dilakukan dengan mengeluarkan data yang memiliki sebaran yang terlalu jauh dari data yang lain.

Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardizedresidual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,164 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terdapat gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Dalam penelitian ini hasil uji multikolinieritas sebagai berikut : Sumber : Lampiran 4

Uji Multikolinieritas melihat nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih dari 10% (0,10) atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinieritas, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari

10% ($X^1=0,997$; $X^2=0,997$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($X^1=1,003$; $X^2=1,003$) yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin- Watson (DW-test atau d statistik) terhadap variabel pengganggu (disturbance error term)nya. Nilai DW hitung kemudian dibandingkan dengan DW tabel datanya $\alpha =5\%$. Jika $DW_u < DW < 4 - DW_u$, maka tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2006). Sumber : Lampiran 4

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai D.W sebesar 1,810 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 41 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=6), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai $dI=1,338$ dan $du=1,659$. Oleh karena nilai DW 1,810 lebih besar dari batas atau (du) 1,659 dan kurang dari $4 - 1,659$ ($4-du$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011 : 139). Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut residual* dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar $X^1=0,145$; $X^2=0,952$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen secara simultan mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R-Square* karena variabel yang diteliti lebih dari dua. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil (Ghozali, 2011).

Dari hasil regresi dapat diketahui angka *Adjusted R-Square* menunjukkan koefisien determinasi atau peranan *variance* (variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka *Adjusted R-Square* sebesar 0,186 menunjukkan bahwa 18,6% variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 81,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak.

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan F_{hitung} sebesar 5,568 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Nilai *F-test* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 5,568 dengan signifikansi 0,008. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Jika nilai $Sig. < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, apabila $Sig. > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil uji t yaitu variabel X^2 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan variabel X^1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

1. Untuk variabel SILPA memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,091 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,400, sehingga dengan tingkat signifikan di atas 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

2. Untuk variabel Belanja Pegawai memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Gianyar Periode 2017-2018.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien parameter sebesar 0,091 dengan tingkat signifikan sebesar 0,400 sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afkarina (2017) yang menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan untuk menentukan besarnya alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh silpa. Semakin tinggi SILPA maka akan mempengaruhi peningkatan alokasi Belanja Modal.

SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode, apabila dalam satu periode penganggaran terjadi sisa anggaran maka dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya. Besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif bagi daerah, yaitu adanya timbal balik yang diterima Pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan dapat berupa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain

PAD yang sah. Namun apabila defisit anggaran belum tertutup maka harus mengurangi pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau dengan mengurangi belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka silpa sama dengan nol.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien parameter sebesar 0,062 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) yang menyebutkan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh variabel belanja pegawai.

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kesenjangan dalam penganggaran belanja tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut : Variabel SILPA memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,091 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,400, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 disimpulkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini

membuktikan bahwa pertimbangan untuk menentukan besarnya alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh silpa. Tidak seluruhnya SILPA digunakan untuk Belanja Modal karena SILPA juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu daerah untuk menutupi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Variabel Belanja Pegawai memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Semakin besar Belanja Modal akan semakin besar pula Belanja Pegawai yang tercipta.

Dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian berikut saran yang dapat diberikan :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar peneliti lain dapat mengembangkan objek penelitian dan menambah variable yang berpengaruh lain sehingga dapat diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan penelitian antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya, sehingga data yang digunakan dalam penelitian bisa lebih baik. Melihat hasil yang menunjukkan saran informasi untuk mengetahui tingkat sisa lebih pembiayaan daerah dan belanja pegawai terhadap belanja modal. Dan dapat dijadikan sebagai catatan

atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2006). Studi atas belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17-32.
- Abdullah, Ramadhaniatun Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah-Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 272-283.
- Abdullah, Riza Rona (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Istishadia*, 7(1), 179-202.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ayu, Nurlaela, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta IENACO_113 ISSN, 2016.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)*. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 september 2013.
- Jensen, M.C dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost dan Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic* 3(4):305-360.
- Kasdy, Laila Murhani. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
Fakultas ekonomi Dan Bisnis universitas Syah Kuala Banda Aceh.

Mahmudi dan Dewi Restiningrum.2008. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umun, Dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Aplikasi Bisnis*.

Maryadi, 2014. Pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, SiLPA, Dan Luas
Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun
2012. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Nuzana, Merizal (2016). Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi
Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10),1-22.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi
Pemerintah* . Pratiwi Ayu, Nurlaela Siti, dan Chomsatu Yuli. 2017
.Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai TerhadapBelanja Modal
Perintah KotaSurakarta. *Jurnal Ekonomi Paradigma*. Universitas Islam Batik
Surakarta.

Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. (2011).*SPSS vs LISREL Sebuah
Pengantar. Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini. 2014. Pengaruh PAD, DAU, Dan SiLPA Pada
Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.E-
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah